

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-1/PPID/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2023 melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2023 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pembahasan terhadap usul informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, terhadap daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- c. bahwa penyesuaian terhadap daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2023 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
DENI SURJANTORO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710; KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3866120; FAKSIMILE (021) 3866120; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1.	Rincian Alokasi dan Realisasi Transfer ke Daerah, yang terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; c. Dana Alokasi Khusus Fisik; d. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik; e. Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal; f. Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah	a. Direktorat Dana Transfer Umum (DTU). b. Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK). c. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK).	a. Direktur DTU. b. Direktur DTK. c. Direktur DDIOKK.	Sebelum dan sepanjang Tahun 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai.



No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	Istimewa Yogyakarta; dan g. Dana Desa. Kode Arsip: 1. IK0.0.2 (Pengalokasian Dana Bagi Hasil [DBH]) 2. IK0.1.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Umum [DAU]) 3. IK0.2.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik) 4. IK0.3.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik) 5. IK0.9.2 (Pengalokasian Insentif Fiskal) 6. IK0.5.2 (Pengalokasian Dana Otonomi Khusus) 7. IK0.7.1 (Pengalokasian Dana Keistimewaan) 8. IK0.8.2 (Pengalokasian Dana Desa) 9. IK5.0 (Laporan Keuangan TKD)					
2.	Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi.	Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	Direktur PDRD.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	Kode Arsip: IK1.0 (Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)					
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Fungsi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Urusan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Pajak.	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)					
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Retribusi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
8.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
9.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
10.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulanan.	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Bulanan, Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)			Jakarta.		